

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, NF,. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. *Accounting Analysis Journal* 3(12): 295-305.
- Ardiansyah, A. 2010. Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*.
- Ariani, TS, Darlis, E. dan Anggraini L. 2017. Pengaruh pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran. *JOM Fekom*. 4(1): 236-250
- Arif, F. 2013. Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pada SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi, *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Baswir, R. 1999. *Akutansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Esa, NPK, Pratiwi TE., dan Perdana BC. 2020. Management control system analysis on official travel cost at PT. Global Medik Persada. *JEAMS*. 1(2): 42-49
- Fuadi. 2013. Pengaruh pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran (Studi empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi). *Jurnal akutansi*. 1(1):1-22.
- Guy, dkk. 2002. *Auditing Jilid 1. 5 Edition*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. 2002. *Akutansi Sektor Publik akutansi keuangan daerah edisi pertama*. Jakarta:Salemba barat.
- Halim, A. dan Kusufi, MS. 2018. *Akutansi sektor publik: akutansi sektor daerah, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Barat.
- Halim, A. dan Iqbal, M. 2019. *Pengelolaan keunagan daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2011 tentang peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan kementrian keuangan.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

- XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- Kurniawan. 2010. Semangat Otonomi dan Kebutuhan Daerah: Kajian Terhadap Penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 2009. *KANUN*. No. 51.
- Lanen, dkk. 2017. *Dasar- Dasar Akutansi Biaya*. Jakarta: salem empat
- Mardiasmo. 2018. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Mahsun.
2019. *Pengukuran kinerja sector publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik edisi 3 cet 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPNMulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba barat
- Munandar. 2001. *Budgeting*. Yogyakarta: BPFE
- Pekel, B. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di era Otonomi. Buku 1*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Purwaji A. dan Wibowo. 2016. *Pengantar akutansi 2, Edisi 2*. Jakarta Selatan: Salemba Barat.
- Saputra, GAB, Sujana, E,. Pengaruh penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif, dan pengawan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada opd di KabupatenBuleleng. *JIMAT Universitas pendidikan Ganesha*. 12(2): 373-382
- Septariani, J, dan Asoka, R. 2020. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada badan pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten musi banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akutansi Rahmanuyah*. 4(1):40-56.
- Siregar, B. 2017. *Akutansi Sektor Public: Akutansi Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual Edisi II*. Yogyakarta: UPPSTIMYPKN
- Soemantri, S. 2014. *Otonomi Daerah*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Solihat, D, Mulyani, S, Yuliafitri, I. 2018. Pengaruh pelaksanaan pengendalian

anggaran internal terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Jurnal BanqueSyar'i*. 4(2): 205-230.

Sujarweni, VW. 2015. *Akutansi sektor publik*. Yogyakarta: Pustaka Press.

Supriyanto, D. 2022. BPK RI menilai pengelolaan anggaran Bapenda Sumsel melanggar peraturan. Diakses dari: <https://detiknews.tv/bpk-ri-temukan-pengelolaan-anggaran-bapenda-sumsel-bermasalah/>

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Widjaja, AW. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo persada.